



RENCANA KERJA (RENJA 2024)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023**



Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2024.

Rencana Kerja tahun 2024 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026, Rencana Strategis SKPD tahun 2021 – 2026 dan Rancangan Awal RKPD tahun 2024 dengan didukung oleh dokumen-dokumen hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumber dan prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 serta untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Kendal,

2023

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Halaman Judul | |
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB. I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB. II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT | 8 |
| DAERAH TAHUN LALU | |
| 2.1. Kajian Terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD | 8 |
| Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD | |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan | 23 |
| Perangkat Daerah | |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi | 25 |
| Perangkat Daerah | |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 26 |
| BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN BPKAD | 41 |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 41 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 43 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 44 |
| BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD | 61 |
| 1. Rencana Kerja Dan Pendanaan BPKAD | 61 |
| BAB. V. PENUTUP | 99 |
| 5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan | 99 |
| 5.2. Rencana Tindak Lanjut | 100 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi di Kabupaten Kendal, dibutuhkan sebuah rencana yang secara komprehensif dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Kendal. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal sebagaimana dijabarkan dalam dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan. Merujuk pernyataan sebelumnya dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal harus menyusun RPJMD dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun anggaran. Penyusunan Renja PD mengacu pada RPJMD 2021 – 2026, Renstra PD, rancangan awal RKPD serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun anggaran sebelumnya untuk proyeksi atas kebutuhan serta dinamika yang akan dihadapi.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan tahunan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra PD menjadi pedoman jangka menengah lima tahunan dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dalam program/kegiatan yang selaras dengan rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru demi tercapainya sasaran pada Renstra PD. Masalah dan dinamika yang dihadapi menjadi acuan perumusan dalam penyusunan rancangan Renja PD sehingga dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD dengan mengakomodir aspirasi yang selaras dengan tugas dan fungsi serta program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja PD dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan dari semua aspirasi yang masuk melalui musrenbang Kecamatan yang akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum ini merupakan pembahasan usulan-usulan yang masuk, juga merupakan sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara Kecamatan dengan OPD yang bersangkutan khususnya untuk melakukan sinkronisasi terhadap usulan-usulan kegiatan setiap kecamatan yang akan diakomodir dalam program dan usulan kegiatan OPD terkait, disamping reses anggota DPRD, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Renja PD disusun kemudian ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Renja tersebut juga dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tindak lanjut hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dimana Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 merupakan pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 ini juga dalam rangka sinkronisasi terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyelarasan yang dilakukan melalui proses pemetaan dengan menyandingkan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada. Masa peralihan ini masih mempedomani RPJMD dan Renstra yang berlaku serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan

sejak tahap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024.

Pemerintah Daerah dalam era otonomi daerah sekarang ini diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal adalah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Oleh karena itu perlu dirancang program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel, sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah yang tertib.

Program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dituangkan dalam Rencana Strategis lima tahunan dan dijabarkan dalam dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun agar dapat menghasilkan sasaran capaian hasil kinerja. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan KUA PPAS, dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sekaligus sebagai instrumen evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang melandasi penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dengan mengacu pada Peraturan Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bagi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- a. Memberikan arahan dan panduan bagi peningkatan sumber-sumber pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam jangka waktu satu tahun;
- b. Memberikan dasar penilaian kinerja penyelenggaraan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kurun waktu satu tahun;
- c. Sebagai Dasar penyusunan program dan kegiatan dalam KUA PPAS tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan program dan kegiatan.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rencana kerja prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan dalam unsur penunjang urusan pemerintahan.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja OPD tahun lalu dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator capaian program/keluaran kegiatan dengan realisasi pada tahun lalu dan target pada tahun berjalan.

Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kinerja pada Program/Keluaran Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam menunjang kinerja BPKAD secara keseluruhan.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan OPD selama 12 bulan sebanyak 7 dokumen (RKA penetapan, RKA perubahan, DPA penetapan, DPA perubahan, Rencana Kerja Tahun 2023, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, Laporan Pengendalian Operasional. Dari target Rp 200.000.000,00 terealisasi Rp 154.377.900,00 atau (77,19%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan OPD selama 12 bulan sebanyak 7 dokumen (RKA penetapan, RKA perubahan, DPA penetapan, DPA perubahan, Rencana Kerja Tahun 2022, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021, Laporan Pengendalian Operasional. Dari target Rp 25.000.000,00 terealisasi Rp 23.459.500,00 atau (93,84 %) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

- c. **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Pencapaian kinerja kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah merupakan penyediaan kegiatan untuk Pekan Raya Kendal, Koordinasi ke Kemendagri terkait capaian sasaran Indikator pada BPKAD dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan internal. Dari target Rp 108.232.000,00 terealisasi Rp 103.603.000,00 atau (95,72%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan asn adalah terbayarnya tagihan gaji dan tunjangan selama 1 (satu) tahun. Dari target Rp 6.504.487.115,00 terealisasi Rp 4.918.518.815,00 atau (75,62 %) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
 - b. **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah terbayarnya Honorarium Penatausahaan Keuangan selama 12 (dua belas) bulan. Dari target Rp 377.620.000,00 terealisasi Rp 369.056.500,00 atau (97,73%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pencapaian kinerja kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja pegawai dari target Rp 175.000.000,00 terealisasi Rp175.000.000,00 atau (100%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. **Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor**

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah terpenuhinya kebutuhan alat-alat dan perlengkapan kebersihan kantor selama 1 (satu) tahun dari target Rp 135.413.500,00 terealisasi Rp 117.994.200,00 atau (87,14%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
 - b. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan bahan logistik kantor adalah terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor kantor selama 1 (satu) tahun dari target Rp 150.000.000,00 terealisasi Rp 134.152.600,00

atau (89,44%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah terpenuhinya kebutuhan cetakan blangko-blangko dan penggandaan dalam rangka memperlancar kegiatan kedinasan selama 12 bulan. Dari target Rp 165.000.000,00 terealisasi Rp 143.156.000,00 atau (86,76%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

d. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah tersedianya bahan bacaan / surat kabar sebanyak 6 jenis selama 12 bulan. Dari target Rp 10.200.000,00 terealisasi Rp 8.085.000,00 atau (79,26%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pencapaian kinerja kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah terlaksananya kegiatan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah selama 12 bulan. Dari target Rp 958.311.500,00 terealisasi Rp 844.344.060,00 atau (88,11%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pencapaian kinerja kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada skpd adalah terlaksananya kegiatan penatausahaan arsip pada SKPD sehingga dapat dikelola dengan dinamis. Dari target Rp 290.000.000,00 terealisasi Rp 253.435.000,00 atau (87,39%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan adalah pengadaan kendaraan berupa motor dan mobil. Dari target Rp 926.853.000,00 terealisasi Rp 842.752.292,00 atau (90,93%) dengan tingkat capaian kinerja 100 %;

b. Pengadaan Mebel

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan mebel adalah pengadaan barang-barang mebel guna menunjang prasarana kantor. Dari target Rp 192.760.000,00 terealisasi Rp 117.954.200,00 atau (61,29%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan aset peralatan dan mesin lainnya adalah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang menunjang kinerja kantor. Dari target Rp 372.991.000,00 terealisasi Rp 347.649.000,00 atau (93,21%) dengan tingkat capaian kinerja 100 %;

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya perangko dan materai untuk kelancaran tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun dan terolahnya surat menyurat dan terdistribusi. Dari Target Rp 10.700.000,00 terealisasi Rp 8.550.000,00 atau (79,91%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

d. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air, listrik dan komunikasi adalah terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik, air dan jaringan internet selama 1 (satu) tahun. Dari target Rp 265.741.350,00 terealisasi Rp 203.404.621,00 atau (76,54%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

e. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum adalah tersedianya terpenuhinya kebutuhan alat-alat dan perlengkapan kebersihan kantor serta jasa Tenaga Keamanan dan Kebersihan sesuai kebutuhan kantor selama 1 (satu) tahun dari target Rp 184.486.000,00 terealisasi Rp 159.712.340,00 atau (86,57%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah terbayarnya pajak-pajak kendaraan bermotor dinas sebanyak 8 unit mobil dan 30 unit kendaraan roda dua selama 12 bulan. Dari target Rp 200.000.000,00 terealisasi Rp 191.479.011,00 atau (95,74%) dengan capaian kinerja 100%;

b. Pemeliharaan peraiatan dan mesin lainnya

Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

adalah tersedianya peralatan, sarana dan prasarana yang siap pakai selama 12 bulan yang berupa 20 Buah Komputer, 15 Buah Printer, 29 Buah AC, 1 buah Genset. Dari target Rp 100.000.000,00 terealisasi Rp 94.879.260,00 atau (94,88%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan adalah tercapainya pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor 2 Paket Pekerjaan meliputi Penataan Ruang Kerja dan Pelayanan pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, serta perbaikan ruang rapat BPKAD berupa penggantian Wallpaper sehingga tersedianya tempat kerja gedung yang nyaman selama 12 bulan. Dari target Rp 245.500.000,00 terealisasi Rp 242.187.940,00 atau (98,65%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

A. Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS adalah terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Dari target Rp 50.000.000,00 terealisasi Rp 32.106.000,00 atau (64,21%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS adalah terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan Dokumen Rancangan KUA, KUPA, PPAS, PPASP dan Dokumen Kesepakatan KUA, KUPA, PPAS, PPASP sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Dari target Rp 40.000.000,00 terealisasi Rp 30.701.250,00 atau (76,75%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD adalah tersedianya RKA SKPD yang benar sesuai ketentuan pada Penetapan APBD TA 2022 dan Perubahan APBD TA 2022. Dari target Rp 180.000.000,00 terealisasi Rp 155.218.300,00 atau (86,23%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan

- daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD adalah terlaksanannya rapat koordinasi mengenai penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dari target Rp 170.000.000,00 terealisasi Rp 128.172.310,00 atau (75,40%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD adalah terlaksanannya rapat koordinasi mengenai penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dari target Rp 90.000.000,00 terealisasi Rp 73.273.742,00 atau (81,42%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- f. Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan regulasi bidang anggaran adalah tersusunnya dokumen kebijakan bidang anggaran. Dari target Rp 1.010.000.000,00 terealisasi Rp 977.210.800,00 atau (96,75%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- g. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan adalah kesesuaian data perencanaan anggaran pendapatan dengan data BPKAD dokumen kebijakan bidang anggaran. Dari target Rp20.000.000,00 terealisasi Rp 10.510.000,00 atau (52,55%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- h. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Pencapaian kinerja kegiatan pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota adalah terlaksanannya kegiatan pembinaan. Dari target Rp 70.000.000,00 terealisasi Rp 69.125.550,00 atau (0%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- B. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi dan pengelolaan kas daerah adalah tersedianya laporan posisi kas daerah sesuai transaksi sebanyak 288 laporan. Dari target Rp 776.000.000,00 terealisasi Rp 749.574.912,00 atau (96,59%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- b. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan

Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya adalah terlaksananya kegiatan yang mendukung dalam pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer. Dari target Rp 25.000.000,00 terealisasi Rp 20.822.300,00 atau (43,06%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

Pencapaian kinerja kegiatan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait adalah kesesuaian data yang dimiliki BPKAD dan data pada SKPD. Dari target Rp150.000.000,00 terealisasi Rp 142.178.000,00 atau (94,79%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

d. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan

Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan adalah tersusunnya dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan pemerintah. Dari target Rp 70.000.000,00 terealisasi Rp 61.493.250,00 atau (87,85%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

C. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah adalah kesesuaian data antara pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Dari target Rp 70.000.000,00 terealisasi Rp 66.933.018,00 atau (95,62%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

b. Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran

Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran adalah tersusunnya laporan pertanggungjawaban bulanan,

triwulanan dan semesteran tahun 2021. Dari target Rp 400.000.000,00 terealisasi Rp 373.218.818,00 atau (93,30%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah tersusunnya laporan tanggapan LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban tahun 2022. Dari target Rp 15.000.000,00 terealisasi Rp 14.052.950,00 atau (93,69%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

d. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah adalah tersusunnya dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Dari target Rp 40.000.000,00 terealisasi Rp 38.806.000,00 atau (97,02%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

D. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

a. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah adalah tersedianya informasi mengenai data keuangan yang akurat. Dari target Rp 427.041.059.355,00 terealisasi Rp 419.896.492.155,00 atau (98,33%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

A. Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Penyusunan Standar Harga

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan standarisasi indeks harga adalah tersusunnya buku Peraturan Bupati Kendal tentang Standarisasi Harga sebanyak 2 buah buku. Dari target Rp 550.000.000,00 terealisasi Rp 510.976.412,00 atau (92,90%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

b. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan penatausahaan barang milik daerah adalah

kesesuaian data yang dimiliki BPKAD dan data pada SKPD. Dari target Rp 356.000.000,00 terealisasi Rp 330.656.242,00 atau (92,88%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah adalah terselenggaranya inventarisasi belanja modal 49 OPD, tersedianya data RKBK/RKPBU dan hasil pengadaan. Dari target Rp 80.000.000,00 terealisasi Rp 78.742.915,00 atau (98,43%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

d. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah

Pencapaian kinerja kegiatan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah adalah terlaksananya optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan pemindah tanganan belanja modal. Dari target Rp 450.000.000,00 terealisasi Rp 393.530.298,00 atau (87,45%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

e. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah adalah tersusunnya laporan mengenai barang milik daerah. Dari target Rp 2.516.000.000,00 terealisasi Rp 2.472.823.818,00 atau (98,28%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;

Tabel T.C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kendal

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

Lembar :

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | | | | |
|------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | | |
| 01 | | | | | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 01 | | 05 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 4 dokumen (Renja,RKA,DPA, Progran Kerja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 2 | 01 | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun | 8 dokumen (Sakip,LPPD,LKPJ, Lapor,POK,RB,ZI, SPIP) | 7 dokumen | 7 dokumen | 7 dokumen | 100% | 7 dokumen | 7 dokumen | 100 |
| 01 | 2 | 01 | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Kendal Expo | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--|------|---|--|--------------|---------------|---------------|----------------|------|---------------|-----------------|---|
| 01 | 2 | 02 | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 02 | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan | 14 bulan | 14 bulan | 14 bulan | 14 bulan | 100% | 14 bulan | 41 Orang/ bulan | |
| 5 | 02 | 01 | | 2.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 Dokumen | |
| 01 | 2 | 05 | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 05 | | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | --- stel | 40 stel | --- stel | ---stel | 100% | ---stel | 0 | 0 |
| 01 | 2 | 05 | | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang dikirim diklat | 10 orang | 10 | 40 | 60 | 150 | 10 orang | 10 | 0 |
| 01 | 2 | 06 | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 06 | | 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan | 3 paket | 3 paket | 3 paket | 3 paket | 100% | 3 paket | 3 paket | |
| 01 | 2 | 06 | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah dos penyediaan makan minum rapat | 12 paket | 12 paket | 12 paket | 12 paket | 100% | 12 paket | 12 paket | |
| 01 | 2 | 06 | | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | jumlah jenis barang cetakan / penggandaan | 3 paket | 3 paket | 3 paket | 3 paket | 100% | 3 paket | 3 paket | |
| 01 | 2 | 06 | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan bacaan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | |
| 01 | 2 | 06 | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah bulan keg.rapat koordinasi dan konsultasi | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | |
| 01 | 2 | 06 | | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | jumlah kegiatan penyusutan arsip | 1000 Dokumen | 1.000 Dokumen | 2.500 Dokumen | 10.128 Dokumen | 100% | 1.000 Dokumen | 1.000 Dokumen | |
| 01 | 2 | 07 | | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 07 | | 02 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah unit pengadaan kendaraan | 0 unit | 0 | 4 Unit | 4 Unit | 100% | 3 unit | 0 unit | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|---|---|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|--|
| 01 | 2 | 07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang diadakan | 6 unit | 0 | 55 unit | 55 unit | 100% | 5 unit | 5 unit | |
| 01 | 2 | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan | 5 unit | 8 unit | 32 unit | 32 unit | 94% | 10 unit | 5 unit | |
| 01 | 2 | 08 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | |
| 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | |
| 01 | 2 | 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | |
| 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah bulan pembayaran honor penatausahaan keuangan tenaga keamanan, tenaga kebersihan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | |
| 01 | 2 | 09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan yang dipelihara | 94 unit | 94 unit | 94 unit | 94 unit | 100% | 94 unit | 94 unit | |
| 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas yang berizin | 94 unit | 94 unit | 94 unit | 94 unit | 100% | 94 unit | 94 unit | |
| 01 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Bulan terpeliharanya Peralatan dan Mesin | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | |
| 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang dipelihara | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 100% | 2 paket | 2 paket | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|--|
| 02 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | | |
| 02 | 2 | 01 | | Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran | | | | | | | | | |
| 02 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS | dok KUAPPAS YANG DISUSUN | 2 dokumen | 0 | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 2 dokumen | |
| 02 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | JUMLAH DOK PERUBAHAN KUAPPAS YANG DISUSUN | 2 dokumen | 0 | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 2 dokumen | |
| 02 | 2 | 01 | 03 | Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | jumlah OPD yang terverifikas dok RKA | 53 dokumen | 53 dokumen | 53 dokumen | 53 dokumen | 100% | 53 dokumen | 53 dokumen | |
| 02 | 2 | 01 | 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 53 dokumen | 53 dokumen | 53 dokumen | 53 dokumen | 100% | 53 dokumen | 53 dokumen | |
| 02 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA OPD yang terverifikasi | 107 dokumen | 107 dokumen | 107 dokumen | 107 dokumen | 100% | 107 dokumen | 107 dokumen | |
| 02 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 107 dokumen | 107 dokumen | 107 dokumen | 107 dokumen | 100% | 107 dokumen | 107 dokumen | |
| 02 | 2 | 01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 2 dokumen | |
| 02 | 2 | 01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 2 dokumen | |
| 02 | 2 | 01 | 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% | 12 dokumen | 12 dokumen | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|--|
| 02 | 2 | 01 | 13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 106 Orang | 0 | 106 Orang | 106 Orang | 100% | 106 Orang | 106 Orang | |
| 02 | 2 | 02 | | Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan | | | | | | | | | |
| 02 | 2 | 02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | jumlah laporan yang disusun | 6 dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | 100% | 6 dokumen | 6 dokumen | |
| 02 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | jumlah dok laporan pengelolaan dana perimbangan dan transfer (gaji dan bankeu) | 184 Laporan | 184 Laporan | 184 Laporan | 184 Laporan | 100% | 184 Laporan | 184 Laporan | |
| 02 | 2 | 02 | 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait | Jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait - Rekonsiliasi Gaji - Rekonsiliasi BPJS | 2 dok | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 2 dokumen | |
| 02 | 2 | 02 | 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan | jumlah dok kebijakan yang disusun (SK PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN, BESARAN UP, JUKNI PENGELOLAAN | 5 dok | 5 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 100% | 5 dokumen | 5 dokumen | |
| 02 | 2 | 03 | | Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | | | | | |
| 02 | 2 | 03 | 01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah | 79 Laporan | 79 Laporan | 79 Laporan | 79 Laporan | 100% | 79 Laporan | 79 Laporan | |
| 02 | 2 | 03 | 03 | Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | 4 Dokumen | 4 Dokumen | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------------|--|
| 02 | 2 | 03 | 06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 2 Dokumen | |
| 02 | 2 | 03 | 09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait penyusunan LK | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| 02 | 2 | 05 | | Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup | | | | | | | | | |
| 02 | 2 | 05 | 02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | SIK yang terpelihara secara rutin | 2 buah | 1 buah | 1 buah | 1 buah | 50% | 1 buah | --- buah | |
| 03 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | | | | | |
| 03 | 2 | 01 | | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | |
| 03 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 2 Dokumen | |
| 03 | 2 | 01 | 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 57 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 Dokumen | 57 Dokumen | |
| 03 | 2 | 01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah aset BMD yang terpeliharanya | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | |
| 03 | 2 | 01 | 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | |
| 03 | 2 | 01 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan. | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% | 5 Dokumen | 5 Dokumen | |
| 03 | 2 | 01 | 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% | 6 Dokumen | 6 Dokumen | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tingkat capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari capaian realisasi capaian indicator pada sasaran strategis Tahun 2021 – 2026 untuk tahun 2022 sebagaimana dalam Tabel berikut :

Tabel TC. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Indikator Sasaran / Indikator | Target Renstra Perangkat Daerah | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|---------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|----------|--------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nilai Sakip | --- | 82,30 | 82,31 | 78,35 | 95,18% | 82,32 | 82,33 | |
| 2 | IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah) | --- | 79,325 | 79,326 | 57,5534 | 72,55% | 79,327 | 79,328 | - Perlunya Koordinasi Lintas OPD. - Perlu SK pembentukan Tim IPKD |
| 3 | Prosentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS | --- | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 4 | Prosentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) | --- | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 5 | Prosentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan | --- | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 6 | Prosentase sistem keuangan yang terintegrasi | --- | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 7 | Prosentase aset daerah yang dikelola dengan baik | --- | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |

Tabel :
Tingkat Capaian Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2022

| No | Jenis Pajak | Target | Realisasi | Prosentase Capaian |
|----|--|---------------|----------------|--------------------|
| 1. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan tanah dan bangunan) | 2.955.000.000 | 2.530.360.670 | 85,63% |
| 2. | Hasil Penjualan Aset Lain lain (BPKAD) | 20.000.000 | 108.992.400,00 | 544,96% |

Pada Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal memperoleh penghargaan sebanyak 1 (Satu) buah antara Lain :

- a. Penghargaan dari BPK RI – Perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali yang ke 7.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu- isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

1. Belum tersedianya depo arsip dan gudang aset;
2. Belum meratanya kapasitas SDM dalam pengelolaan pendapatan dari sektor retribusi, keuangan dan aset;
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
4. Kurangnya pemahaman aparatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Kurang optimalnya pemanfaatan SDM dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
6. Perencanaan yang kurang tepat sehingga menimbulkan jumlah silpa yang besar;
7. Keberadaan aset tetap daerah yang belum dapat ditelusuri kebenarannya karena terkendala bukti kepemilikan;
8. Masih banyaknya aset tetap yang belum memiliki sertifikat;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2022 telah dilaksanakan 1 (satu) urusan 3 program 13 kegiatan. Dari 3 program semua program sudah memenuhi target kinerja dan 1 program belum memenuhi target kinerja dikarenakan Kurangnya pemahaman terhadap kriteria Penilaian dengan solusi Berkoordinasi dengan OPD di Pemkab Kendal dan Kementerian terkait sehingga program tersebut tidak sesuai target. Dari 13 kegiatan terdapat 11 kegiatan telah memenuhi target kinerja sedangkan 2 kegiatan lainnya masih belum memenuhi target dikarenakan Kurangnya pemahaman terhadap kriteria Penilaian dengan solusi Berkoordinasi dengan OPD di Pemkab Kendal dan Kementerian terkait. Secara lengkap review terhadap rancangan awal tersaji pada tabel TC.31

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN KENDAL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KENDAL

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|-------------|--|---|----------------------|---|-------------|--|---|------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Kab. Kendal | Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | 8.114.833.991 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Kab. Kendal | Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | 9.579.890.050 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Kendal | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun | 11 Dokumen | 138.993.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Kendal | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun | 11 Dokumen | 272.128.000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen (Renja,RKA, DPA,Program Kerja) | 76.493.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen (Renja,RKA, DPA,Program Kerja) | 124.283.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan (Sakip,LPPD, LKPJ,Lapor, POK, PMRB,ZI,SPIP) | 11.740.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan (Sakip,LPPD, LKPJ,Lapor, POK, PMRB,ZI,SPIP) | 15.000.000 | |
| | Evaluasi Kinerja | Kab. Kendal | Jumlah Laporan | 1 Laporan | | Evaluasi Kinerja | Kab. Kendal | Jumlah Laporan | 1 Laporan | 132.845.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|------------------|---------------|---|-------------|--|------------------|----------------|--|
| | Perangkat Daerah | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 50.760.000 | Perangkat Daerah | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Kendal | Jumlah ASN BPKAD Kab. Kendal yang mengelola kegiatan Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN | Orang Bulan | 5.968.264.741 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Kendal | Jumlah ASN BPKAD Kab. Kendal yang mengelola kegiatan Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN | Orang Bulan | 6.575.131.100 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Kendal | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 41 Orang / bulan | 5.552.094.741 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Kendal | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 41 Orang / bulan | 6.151.281.100 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen | 416.170.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen | 423.850.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Kendal | Jumlah ASN yang terlayani | Orang | 175.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Kendal | Jumlah ASN yang terlayani | Orang | 50.000.000 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Kendal | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 175.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Kendal | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 50.000.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Kendal | Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin | Bulan | 894.426.250 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Kendal | Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin | Bulan | 1.597.930.950 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Kendal | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 135.413.500 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Kendal | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 135.413.500,00 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Kendal | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 54.005.950 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Kendal | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 54.005.950 | |
| | Penyediaan Bahan | Kab. Kendal | Jumlah Paket | 2 Paket | 150.000.000 | Penyediaan Bahan | Kab. Kendal | Jumlah Paket Bahan | 2 Paket | 150.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|--|-------------|-------------|------------|
| | Logistik Kantor | | Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | Logistik Kantor | | Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Kendal | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 165.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Kendal | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 165.000.000 | 75.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 10.200.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 10.200.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | 254.806.800 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | 958.311.500 | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 125.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 125.000.000 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Kendal | Jumlah sarana prasarana yang diadakan | 20 Unit | 19.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Kendal | Jumlah sarana prasarana yang diadakan | Unit | 244.000.000 | |
| | Pengadaan Mebel | Kab. Kendal | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 12.000.000 | Pengadaan Mebel | Kab. Kendal | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 144.000.000 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Kendal | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 7.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Kendal | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 100.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Kendal | Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin | Bulan | 470.700.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Kendal | Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin | Bulan | 470.700.000 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 Laporan | 20.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 Laporan | 20.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 6 Laporan | 265.700.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 6 Laporan | 265.700.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|------------|---------------|---|-------------|--|------------|-----------------|--|
| | Daya Air dan Listrik | | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | Sumber Daya Air dan Listrik | | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 185.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 185.000.000 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara | 94 Unit | 370.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara | 94 Unit | 370.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Kendal | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 46 Unit | 175.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Kendal | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 46 Unit | 175.000.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Kendal | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 86 Unit | 95.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Kendal | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 86 Unit | 95.000.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Kendal | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 100.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Kendal | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 100.000.000 | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Kab. Kendal | % kesesuaian APBD dengan KUA PPAS | 100 Persen | 2.388.716.000 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Kab. Kendal | % kesesuaian APBD dengan KUA PPAS | 100 Persen | 498.004.130.331 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Kab. Kendal | JUMLah dok anggaran daerah yang disusun (KUAPPAS, RKA, RAPBD, APBD, DPA) | 5 Dokumen | 1.432.516.000 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Kab. Kendal | JUMLah dok anggaran daerah yang disusun (KUAPPAS, RKA, RAPBD, APBD, DPA) | 5 Dokumen | 1.596.400.000 | |

| | | | Jumlah Dokumen Anggaran Daerah yang disusun (KUA, PPAS, RKA, DPA, RAPBD, APBD) | | | | | Jumlah Dokumen Anggaran Daerah yang disusun (KUA, PPAS, RKA, DPA, RAPBD, APBD) | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|-------------|---|-------------|--|-------------|-------------|--|
| | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 64.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 75.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 60.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 75.000.000 | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | Kab. Kendal | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 107 Dokumen | 91.400.000 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Kab. Kendal | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 107 Dokumen | 91.400.000 | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi | 107 Dokumen | 80.700.000 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi | 107 Dokumen | 90.300.000 | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | Kab. Kendal | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 107 Dokumen | 62.150.000 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | Kab. Kendal | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 107 Dokumen | 70.000.000 | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi | 107 Dokumen | 51.800.000 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi | 107 Dokumen | 60.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kab. Kendal | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 136.491.000 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kab. Kendal | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 150.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan dan Peraturan | Kab. Kendal | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan | 2 Dokumen | 84.119.000 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan dan Peraturan | Kab. Kendal | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan | 2 Dokumen | 75.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-----------|-------------|--|-------------|--|-----------|-------------|--|
| | APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 Dokumen | 801.356.000 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 Dokumen | 850.000.000 | |
| | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Kendal | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota | 53 Orang | | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Kendal | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota | 53 Orang | 60.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Kab. Kendal | Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan perbendaharaan daerah | 49 OPD | 531.950.000 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Kab. Kendal | Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan perbendaharaan daerah | 49 OPD | 635.000.000 | |
| | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 6 Dokumen | 325.000.000 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 6 Dokumen | 325.000.000 | |
| | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 5 Dokumen | 30.000.000 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 5 Dokumen | 40.000.000 | |
| | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran | 2 Dokumen | 76.950.000 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas | 2 Dokumen | 160.000.000 | |

| | dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | |
|--|---|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------|--|
| | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Kab. Kendal | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 5 Dokumen | 100.000.000 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Kab. Kendal | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 5 Dokumen | 110.000.000 | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Kab. Kendal | Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan perbendaharaan daerah | 51 OPD | 383.370.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Kab. Kendal | Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan perbendaharaan daerah | 51 OPD | 505.000.000 | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 2 Laporan | 75.000.000 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 2 Laporan | 85.000.000 | |
| | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 5 Laporan | 166.225.000 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 5 Laporan | 275.000.000 | |
| | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah | 105 Laporan | 50.000.000 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 105 Laporan | 60.000.000 | |

| | | | Daerah yang Terkonsolidasi | | | | | yang Terkonsolidasi | | | |
|--|---|-------------|---|-----------|------------|---|-------------|---|-----------|------------|---|
| | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 5 Dokumen | 15.000.000 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 5 Dokumen | 20.000.000 | |
| | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 40.000.000 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 60.000.000 | |
| | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Kendal | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 105 Orang | 37.145.000 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Kendal | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 105 Orang | 85.000.000 | |
| | Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | - | - | - | 40.880.000 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | - | - | - | 70.000.000 | - |
| | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Kab. Kendal | SIK yang terpelihara secara rutin | 2 buah | 40.880.000 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Kab. Kendal | SIK yang terpelihara secara rutin | 2 buah | 70.000.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-----------------|---|-------------|--|-------------|-----------------|
| Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Desa di Kabupaten Kendal | 266 Desa | 383.314.868.726 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Desa di Kabupaten Kendal | 266 Desa | 495.772.730.331 |
| Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 266 Laporan | 349.269.432.110 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 266 Laporan | 459.144.316.200 |
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Laporan | 5.000.000.000 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Laporan | 8.250.000.000 |
| Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 266 Laporan | 29.045.436.616 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 266 Laporan | 35.803.414.131 |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Kab. Kendal | Jumlah aset daerah yang teraudited tahun n-1 dibagi jumlah aset daerah n-1 kali 100% | 100 Persen | 4.155.640.000 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Kab. Kendal | jumlah aset daerah yang teraudited tahun n-1 dibagi jumlah aset daerah n-1 kali 100% | 100 Persen | 3.450.000.000 |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Prosentase aset daerah yang dikelola dengan baik | 100 Persen | 4.155.640.000 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Prosentase aset daerah yang dikelola dengan baik | 100 Persen | 3.450.000.000 |
| Penyusunan Standar Harga | Kab. Kendal | Jumlah Standar yang Disusun | 2 Dokumen | 185.800.000 | Penyusunan Standar Harga | Kab. Kendal | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 2 Dokumen | 350.000.000 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 60.000.000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 60.000.000 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 250.000.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 160.000.000,00 |
| Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 80.000.000 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 60.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-----------|------------------------|---|-------------|--|---------------|------------------------|--|
| | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 5 Dokumen | 360.000.000 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 5 Dokumen | 220.000.000 | |
| | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 6 Laporan | 3.219.840.000 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 6 Laporan | 2.600.000.000 | |
| | JUMLAH | | | | 383.314.868.726 | | | | JUMLAH | 511.034.020.381 | |

Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN KENDAL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KENDAL

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | Catatan Penting |
|-----|---|-------------|--|--|---------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | | | | 8.114.833.991 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 138.993.000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen (Renja,RKA,DPA,Program Kerja) | 76.493.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan (Sakip,LPPD,LKPJ,Lapor,POK, PMRB,ZI,SPIP) | 11.740.000 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 50.760.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 5.968.264.741 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Kendal | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 41 Orang / bulan | 5.552.094.741 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen | 416.170.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 175.000.000 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Kendal | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 175.000.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 894.426.250 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Kendal | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 135.413.500 | |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|---------------|--|
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Kendal | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 54.005.950 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Kendal | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 150.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Kendal | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 165.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 10.200.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | 254.806.800 | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 125.000.000 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 19.000.000 | |
| | Pengadaan Mebel | Kab. Kendal | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 12.000.000 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Kendal | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 7.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 470.700.000 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 Laporan | 20.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 6 Laporan | 265.700.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 185.000.000 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 448.450.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Kendal | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 46 Unit | 175.000.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Kendal | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 86 Unit | 105.950.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Kendal | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 167.500.000 | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | 2.388.716.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | 1.432.516.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang | 2 Dokumen | | |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|-------------|--|
| | PPAS | | Disusun | | 64.500.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 60.000.000 | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | Kab. Kendal | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 107 Dokumen | 91.400.000 | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi | 107 Dokumen | 80.700.000 | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | Kab. Kendal | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 107 Dokumen | 62.150.000 | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Kab. Kendal | Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi | 107 Dokumen | 51.800.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kab. Kendal | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 136.491.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kab. Kendal | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | 84.119.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 Dokumen | 801.356.000 | |
| | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Kendal | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota | 53 Orang | - | |
| | | | | | | |
| | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | 531.950.000 | |
| | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 6 Dokumen | 325.000.000 | |
| | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 5 Dokumen | 30.000.000 | |
| | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 2 Dokumen | 76.950.000 | |
| | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Kab. Kendal | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 5 Dokumen | 100.000.000 | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|---|-------------|------------------------|--|
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | 383.370.000 | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 2 Laporan | 75.000.000 | |
| | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 5 Laporan | 166.225.000 | |
| | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 105 Laporan | 50.000.000 | |
| | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 5 Dokumen | 15.000.000 | |
| | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 40.000.000 | |
| | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Kendal | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 105 Orang | 37.145.000 | |
| | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 383.314.868.726 | |
| | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 266 Laporan | 383.314.868.726 | |
| | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Laporan | 349.269.432.110 | |
| | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 266 Laporan | 5.000.000.000 | |
| | Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | | 40.880.000 | |
| | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Kab. Kendal | SIK yang terpelihara secara rutin | 2 buah | 40.880.000 | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | 4.155.640.000 | |
| | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 4.155.640.000 | |
| | Penyusunan Standar Harga | Kab. Kendal | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 2 Dokumen | 185.800.000 | |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-----------|-----------------|--|
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 60.000.000 | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 250.000.000 | |
| | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 80.000.000 | |
| | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 5 Dokumen | 360.000.000 | |
| | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab. Kendal | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 6 Laporan | 3.219.840.000 | |
| | JUMLAH | | | | 397.974.058.717 | |

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. **Arah Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan RKP tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan fokus pada penyelesaian target-target pembangunan. RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

• **Arah Kebijakan Provinsi**

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas", yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2024.

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada :

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih

optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas

- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata,
- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung.
- d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif

- **Arah Kebijakan Kabupaten**

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 di prioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City”. Arah kebijakan ini dengan fokus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan clean dan Good Governances, penguatan Smart City yang difokuskan pada Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy dan Smart Transportation. Focus smart transportation adalah pada peningkatan kualitas transportasi masal seperti penyediaan BRT yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi informasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan yang dilakukan diantaranya melalui :

1. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing;
2. Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan;
3. Penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensidan unggulan daerah;
4. Penguatan industry kecil dan menengah/UMKN, pengembangan pariwisata serta mendorong ekonomi kreatif;
5. Pembangunan infrastuktur yang mantap serta memperhatikan daya dukungdan kelestarian lingkungan;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipasif, serta kondisivitas daerah yang baik dan harmonis.

Adapun program prioritas pada tahun 2024 difokuskan pada :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pengelolaan keuangan daerah

2. Terlaksananya pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertanggungjawab:.
3. Tersajinya laporan keuangan dan aset daerah yang sistematis dan akuntabel:.

Dari beberapa tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan sasaran- sasaran strategis yang akan diraih oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, yaitu :

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui sistem jaringan elektronik;
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertanggungjawab;
3. Terwujudnya laporan keuangan dan aset daerah yang sistematis dan akuntabel.

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2024 mempunyai Program dan Kegiatan dan sebagai berikut :

| No | Uraian | Pagu Anggaran | Sumber Pendanaan |
|----|---|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | BPKAD KABUPATEN KENDAL | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.114.833.991 | PAD |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 138.993.000 | PAD |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 76.493.000 | PAD |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11.740.000 | PAD |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50.760.000 | PAD |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.968.264.741 | PAD |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.552.094.741 | DAU |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 416.170.000 | PAD |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 175.000.000 | PAD |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 175.000.000 | PAD |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 894.426.250 | PAD |
| 1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 135.413.500 | PAD |
| 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 54.005.950 | PAD |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 150.000.000 | PAD |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 165.000.000 | PAD |
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.200.000 | PAD |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 254.806.800 | PAD |
| 7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 125.000.000 | PAD |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 19.000.000 | PAD |
| 1 | Pengadaan Mebel | 12.000.000 | PAD |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.000.000 | PAD |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 470.700.000 | PAD |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20.000.000 | PAD |

| No | Uraian | Pagu Anggaran | Sumber Pendanaan |
|----|---|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 265.700.000 | PAD |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 185.000.000 | PAD |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 448.450.000 | PAD |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 175.000.000 | PAD |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 105.950.000 | PAD |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 167.500.000 | PAD |
| II | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 2.388.716.000 | PAD |
| 8 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.432.516.000 | PAD |
| 1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 64.500.000 | PAD |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 60.000.000 | PAD |
| 3 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 91.400.000 | PAD |
| 4 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 80.700.000 | PAD |
| 5 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 62.150.000 | PAD |
| 6 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 51.800.000 | PAD |
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 136.491.000 | PAD |
| 8 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 84.119.000 | PAD |
| 9 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 801.356.000 | PAD |
| 10 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | - | PAD |
| 9 | 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 40.880.000 | PAD |
| 1 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 40.880.000 | PAD |
| 10 | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 531.950.000 | PAD |
| 1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 325.000.000 | PAD |
| 2 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 30.000.000 | PAD |
| 3 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 76.950.000 | PAD |
| 4 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 100.000.000 | PAD |
| II | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 383.370.000 | PAD |
| 1 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 75.000.000 | PAD |
| 2 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 166.225.000 | PAD |
| 3 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 50.000.000 | PAD |
| 4 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 15.000.000 | PAD |
| 5 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 40.000.000 | PAD |

| | | | |
|-----|---|------------------------|------------|
| 6 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 37.145.000 | PAD |
| 12 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 40.880.000 | PAD |
| 1 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 40.880.000 | PAD |
| | PPKD | 383.314.868.726 | PAD |
| 13 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 383.314.868.726 | PAD |
| 1 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 349.269.432.110 | PAD |
| 2 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 5.000.000.000 | PAD |
| 3 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 29.045.436.616 | PAD |
| III | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 4.155.640.000 | PAD |
| 14 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 4.155.640.000 | PAD |
| 1 | Penyusunan Standar Harga | 185.800.000 | PAD |
| 2 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 60.000.000 | PAD |
| 3 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 250.000.000 | PAD |
| 4 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 80.000.000 | PAD |
| 5 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 360.000.000 | PAD |
| 6 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 3.219.840.000 | PAD |
| | BPKAD | 14.659.189.991 | |
| | PPKD | 383.314.868.726 | |
| | JUMLAH TOTAL | 397.974.058.717 | |

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kendal
Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | |
|------|---|--|---|--|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--|-----------|------------------|
| | | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | | | |
| | | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | 510.549.834.022,00 | | |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 510.549.834.022,00 | | |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | | | | | | | 510.549.834.022,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 8.480.703.691,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 272.128.000,00 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 4 Dokumen | 11 Dokumen 100 persen | 76.493.000,00 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 124.283.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 8 Laporan | 11 Dokumen 100 persen | 11.740.000,00 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan | 15.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 1 Laporan | 11 Dokumen 100 persen | 50.760.000,00 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 132.845.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5.968.264.741,00 | | | | 5.475.944.741,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|----------|----------------|----------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|------------------|
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 37 Orang/bulan | 14 Bulan 14 Bulan | 5.552.094.741,00 | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 Orang/bulan | 5.052.094.741,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 2 Dokumen | 14 Bulan 14 Bulan | 416.170.000,00 | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen | 423.850.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 175.000.000,00 | | | 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 20 Orang | 61 Orang 61 Paket | 175.000.000,00 | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | 50.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 894.426.250,00 | | | 1.597.930.950,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 3 Paket | 61 Orang 12 Bulan 12 Bulan | 135.413.500,00 | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 135.413.500,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 4 Paket | 61 Orang 12 Bulan 12 Bulan | 54.005.950,00 | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 54.005.950,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 12 Paket | 61 Orang 12 Bulan 12 Bulan | 150.000.000,00 | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|----------|--------------|----------------------------------|----------------|--|--|--------------|----------------|
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 3 Paket | 61 Orang 12 Bulan 12 Bulan | 165.000.000,00 | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 165.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 12 Dokumen | 61 Orang 12 Bulan 12 Bulan | 10.200.000,00 | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 10.200.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 12 Laporan | 61 Orang 12 Bulan 12 Bulan | 254.806.800,00 | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 958.311.500,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 1000 Dokumen | 61 Orang 12 Bulan 12 Bulan | 125.000.000,00 | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1000 Dokumen | 125.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 19.000.000,00 | | | | 244.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 6 Unit | 11 Unit 11 Unit | 12.000.000,00 | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Unit | 144.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 5 Unit | 11 Unit 11 Unit | 7.000.000,00 | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 100.000.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 470.700.000,00 | | | | 470.700.000,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|----------|------------|----------------------|----------------|--|--|------------|----------------|--|
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 12 Laporan | 12 Bulan 12 Bulan | 20.000.000,00 | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 20.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 12 Laporan | 12 Bulan 12 Bulan | 265.700.000,00 | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 265.700.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 12 Laporan | 12 Bulan 12 Bulan | 185.000.000,00 | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 185.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 448.450.000,00 | | | | 370.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 81 Unit | 94 Unit 94 Unit | 175.000.000,00 | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 81 Unit | 175.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 12 Unit | 94 Unit 94 Unit | 105.950.000,00 | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 95.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100.00 % | 1 Unit | 94 Unit 94 Unit | 167.500.000,00 | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 100.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---------------------------------|------------|-----------|---------------------------|--|--|------------|---------------------------|
| 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | 385.703.584.726,00 | | | | 498.619.130.331,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | 1.432.516.000,00 | | | | 1.596.400.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 2 Dokumen | 5 Dokumen | 64.500.000,00 | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 75.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 2 Dokumen | 5 Dokumen | 60.000.000,00 | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 75.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu | 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 53 Dokumen | 5 Dokumen | 91.400.000,00 | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 53 Dokumen | 91.400.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|-------------|-----------|---------------|--|---|-------------|---------------|--|
| | | | | | (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 53 Dokumen | 5 Dokumen | 80.700.000,00 | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 53 Dokumen | 90.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 107 Dokumen | 5 Dokumen | 62.150.000,00 | | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 107 Dokumen | 70.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase | 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 107 Dokumen | 5 Dokumen | 51.800.000,00 | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 107 Dokumen | 60.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|------------|-----------|----------------|--|--|------------|----------------|
| | | | | | | pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | | | | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 1 Dokumen | 5 Dokumen | 136.491.000,00 | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 1 Dokumen | 150.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 2 Dokumen | 5 Dokumen | 84.119.000,00 | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | 75.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan | 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 12 Dokumen | 5 Dokumen | 801.356.000,00 | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 12 Dokumen | 850.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|-----------|------------|----------------|---|-----------|----------------|
| | | | | | keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | | | | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 106 Orang | 5 Dokumen | 0.00 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 106 Orang | 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | 531.950.000,00 | | | 635.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 6 Dokumen | 49 Dokumen | 325.000.000,00 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 6 Dokumen | 325.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---------------------------------|-------------|------------|----------------|--|---|-------------|----------------|
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 184 Dokumen | 49 Dokumen | 30.000.000,00 | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 184 Dokumen | 40.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 2 Dokumen | 49 Dokumen | 76.950.000,00 | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 2 Dokumen | 160.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 5 Dokumen | 49 Dokumen | 100.000.000,00 | | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 5 Dokumen | 110.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|------------|--------|----------------|--|---|------------|----------------|
| | | | | | terintegrasi | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | 383.370.000,00 | | | | 585.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 79 Laporan | 51 OPD | 75.000.000,00 | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 79 Laporan | 85.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 5 Laporan | 51 OPD | 166.225.000,00 | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 5 Laporan | 275.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu | 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 51 Laporan | 51 OPD | 50.000.000,00 | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 51 Laporan | 60.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---------------------------------|-----------|--------|---------------|--|--|-----------|---------------|
| | | | | | (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 2 Dokumen | 51 OPD | 15.000.000,00 | | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 2 Dokumen | 51 OPD | 40.000.000,00 | | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|-------------|-------------|--------------------|---|-------------|--------------------|
| | | | | | Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persentase sistem keuangan yang terintegrasi | 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 31 Orang | 51 OPD | 37.145.000,00 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 31 Orang | 85.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 383.314.868.726,00 | | | 495.772.730.331,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | |
| | | | | | Persentase sistem keuangan yang terintegrasi Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) | 50.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % | 266 Laporan | 266 Laporan | 349.269.432.110,00 | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 266 Laporan | 459.144.316.200,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | |
| | | | | | Persentase sistem keuangan yang terintegrasi Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu | 50.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % | 1 Laporan | 266 Laporan | 5.000.000.000,00 | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Laporan | 825.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|------|------|---|----------|------------|------------|--------------------|--|------------|--------------------|
| | | | | | Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik | 100.00 % | 2 Dokumen | 100 persen | 60.000.000,00 | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | |
| | | | | | Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik | 100.00 % | 1 Laporan | 100 persen | 250.000.000,00 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 160.000.000,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | |
| | | | | | Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik | 100.00 % | 1 Laporan | 100 persen | 80.000.000,00 | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 60.000.000,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | |
| | | | | | Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik | 100.00 % | 5 Dokumen | 100 persen | 360.000.000,00 | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 5 Dokumen | 220.000.000,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | |
| | | | | | Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik | 100.00 % | 12 Laporan | 100 persen | 3.219.840.000,00 | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 12 Laporan | 2.600.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 397.974.058.717,00 | | | 510.549.834.022,00 |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BPKAD

4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Rencana Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal terdapat 3 (Tiga) program Dan Pendanaan Perangkat Daerah tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024, berikut adalah program kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal terdiri dari Tiga program dan 13 kegiatan di atas dilaksanakan dalam 46 (Empat puluh enam) sub kegiatan sebagaimana dalam lampiran. antara lain :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KENDAL
TAHUN 2024**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | 397.974.058.717,00 | | | | | | | | 510.549.834.022,00 | |
| 5 | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 397.974.058.717,00 | | | | | | | 510.549.834.022,00 | | |
| | 5.02 | KEUANGAN | | | | | | 397.974.058.717,00 | | | | | | | 510.549.834.022,00 | | |
| 1. | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah</i> | 100.00 % | | | 100.00 % | 8.114.833.991,00 | | | | | | 100.00 % | 8.480.703.691,00 | | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah</i> | | | | 11 Dokumen 100 persen | 138.993.000,00 | | | | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 272.128.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK BASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|-------------------|------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 76.493.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dosa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 124.283.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.01.2.01.0006 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 8 Laporan | 11.740.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemanla pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 15.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 1 Laporan | 50.760.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 132.845.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah</i> | | | | 14 Bulan 14 Bulan | 5.968.264.741,00 | | | - | 4. Perbaikan tata kelola pemennth an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan pertisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 5.475.944.741,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|--|--|---------------------|---|---|-----------|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 37 Orang/bulan | 5.552.094.741,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 5.052.094.741,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Peaksanaan Tugas ASN | | | | 2 Dokumen | 416.170.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 423.850.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SABARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang terlayani Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah | - | | | 61 Orang 61 Paket | 175.000.000,00 | | | | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntaboli dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 20 Orang | 175.000.000,00 | Kab Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabal dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang tertayani Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah | - | | | 61 Orang 12 Bulan 12 Bulan | 894.428.250,00 | | | - | 4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 1.597.930.950,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 135.413.500,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 135.413.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 165.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 165.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 10.200.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK BASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 254.806.800,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 958.311.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1000 Dokumen | 125.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 125.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK BASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 265.700.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KalDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 265.700.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 185.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kndutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 185.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah</i> | | | | 94 Unit 94 Unit | 448.450.000,00 | | | - | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas witayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kndutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 370.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 81 Unit | 175.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 175.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 105.950.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 95.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|---|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 167.500.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 2 | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | <i>Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase sistem keuangan yang terintegrasi</i> | 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % | | | 100.00 % 50.00 % | 385.703.584.726,00 | | | | | | 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % | 498.619.130.331,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah dok anggaran daerah yang disusun (KUAPPAS, RKA, RAPBD, APBD, DPA) | - | | | 5 Dokumen | 1.432.516.000,00 | | | | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | - | 1.596.400.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 64.500.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 75.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK BASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|--|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i> | | | | 2 Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemanfaatan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 75.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 53 Dokumen | 91.400.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemantauan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 91.400.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 53 Dokumen | 80.700.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemantauan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 90.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | | | | 107 Dokumen | 62.150.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 70.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 107 Dokumen | 51.800.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Peman- pan tata kelola pem- erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin- gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 60.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.02.2.01.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | 1 Dokumen | 136.491.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5 Peman- pan tata kelola pem- erintahan dan kondisivitas wilayan serta penin- gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 150.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|-------------------|---|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | 2 Dokumen | 84.119.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, hamonis berbasis smart city | | 75.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | 12 Dokumen | 801.356.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, hamonis berbasis smart city | | 850.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | 6 Dokumen | 325.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 325.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.02.2.02.0005 | | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | 184 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Ket/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 40.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|-------------------|---|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | 2 Dokumen | 76.950.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 160.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penemuan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i> | | | | 5 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Kandal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemantauan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 110.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.02.2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | <i>Jumlah OPD yang dibinadalam penyusunan laporan keuangan</i> | | | | 51 OPD | 383.370.000,00 | | | | 5. Pemantauan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 585.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.02.2.03.0001 | | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i> | | | | 79 Laporan | 75.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemantauan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 85.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.02.2.03.0003 | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i> | | | | 5 Laporan | 166.225.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5 Pemantauan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 275.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK BASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | | | | 51 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kandal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemanfaatan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | - | | 60.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Temadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|-------------------|------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 02 02 2 03 0009 | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 60.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|-------------------|------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5.02.02.2.03.0011 | | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 31 Orang | 37.145.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 85.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.02.2.04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah desa penerima DD,ADD, bagi hasil pajak dan retribusi | | | | 266 Laporan | 383.314.868.726,00 | | | | 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 495.772.730.331,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJ OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAGRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|--|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | 266 Laporan | 349.269.432.110,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dess | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemerta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | 459.144.316.200,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SABARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|-------------------|------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | 1 Laporan | 5.000.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Peman- tan tata kelola pem- erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin- gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | 825.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 5.02.02.2.04.0010 | | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 29.045.436.616,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Peman- tan tata kelola pem- erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin- gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yahg yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, hamonis berbasis smart city | | 35.803.414.131,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | | | | 40.880.000,00 | | | | 4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani | | | 30.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | 2 Dokumen | 40.880.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani | | | 30.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3. | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik | 100,00 % | | | 100,00 % | 4.155.640.000,00 | | | | | | 100,00 % | 3.450.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | <i>jumlah aset daerah yang teraudit tahun n-1 dibagi jumlah aset daerah n-1 kali 100%</i> | | | | 100 persen | 4.155.640.000,00 | | | - | 5. Pemantauan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 3.450.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i> | | | | 1 Dokumen | 185.800.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemantauan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 350.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 160.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 80.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Pemanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 60.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | 5 Dokumen | 380.000.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Permanta pan tata kelola pem erintahan dan kondisivitas wilayah serta penin gkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 220.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---------------|------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | | | 12 Laporan | 3.219.840.000,00 | Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Pemantauan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondisivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city | | | 2.600.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | 397.974.058.717,00 | 510.549.834.022,00 | |

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Anggaran 2024 Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan – persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal adalah Program dan kegiatan Tahunan yang sesuai dengan Tugas dan fungsi serta sasaran Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

RENJA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun tahun juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. Selain itu RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dengan telah disepakati dan ditetapkannya dokumen perencanaan berupa RENJA-OPD, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja-OPD ini sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja OPD;
2. Program dan kegiatan selaras dengan system perencanaan dan penganggaran, maka program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Renja-OPD akan dilakukan perubahan sebagaimana perlunya guna penyesuaian dengan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 manakala terjadi revisi sebagai akibat penyesuaian dengan hasil evaluasi .

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Kendal, 2023

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah,

Asisten Administrasi Setda
Kabupaten Kendal



[Handwritten Signature]

AGUS DWI LESTARI, S.IP, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720829 199203 1 003



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/167 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan

- Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
2. Sekretaris bertugas :
- a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Anggaran bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang anggaran dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang perbendaharaan dan akuntansi dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah bertugas : |
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
7. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Anggaran, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 3 MEI 2023 .

BUPATI KENDAL



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
 3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 050/167/2023

TANGGAL : 3 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|---|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Ketua | |
| 2. | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Sekretaris | |
| 3. | Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan | | |
| | Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Koordinator Kelompok Kerja | |
| | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Anggota | |
| 4. | Kelompok Kerja Bidang Anggaran | | |
| | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Koordinator Kelompok Kerja | |
| | Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Anggota | |

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|--|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Anggota | |
| | Sub Koordinator Analisis Kebijakan dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Anggota | |
| 5. | Kelompok Kerja Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi | | |
| | Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Koordinator Kelompok Kerja | |
| | Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Penilaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Anggota | |
| | Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Anggota | |
| | Sub Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Anggota | |

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|---|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah | | |
| | Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Koordinator Kelompok Kerja | |
| | Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengamanan, dan Penilaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Anggota | |
| | Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupten Kendal | | |
| | Sub Koordinator Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Penggunaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal | Anggota | |

BUPATI KENDAL.



DICO M GANINDUTO

1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir renja PD dengan rancangan akhir RKPD
 - a. Mendapatkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk reviu rancangan akhir renja PD

BPKAD ✓

| No | Dokumen | Catatan Reviu | | | |
|----|---|---------------|-------|------------|-------------|
| | | Ada | Tidak | Keterangan | Rekomendasi |
| 1 | Rancangan akhir RKPD | √ | - | Sesuai | - |
| 2 | Renstra PD | √ | - | sesuai | - |
| 3 | Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya | √ | - | Sesuai | - |
| 4 | Berita acara forum perangkat daerah Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan | √ | - | sesuai | - |
| 5 | Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan | √ | - | Sesuai | - |
| 6 | Berita acara hasil rapat koordinasi teknis pembangunan | √ | - | sesuai | - |
| 7 | Peraturan menteri teknis terkait standar pelayanan minimal | √ | - | Sesuai | - |

b. Yakinkan rumusan sasaran perangkat daerah dalam BAB III rancangan akhir Renja PD telah sesuai dengan sasaran pada BAB IV yang ditetapkan dalam rancangan akhir RKPD

| | | BPKAD | | | |
|----|---|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| No | Sasaran Perangkat Daerah Dalam Rancangan Akhir Renja PD | Sasaran Pada Rancangan Akhir RKPD | Catatan Reviu | | |
| | | | Sesuai | Tidak Sesuai | Rekomendasi |
| 1. | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui sistem jaringan elektronik | Meningkatnya birokrasi yang akuntabel | √ | - | - |
| 2. | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertanggungjawab | | √ | - | - |
| 3. | Tersajinya laporan keuangan dan aset daerah yang sistematis dan akuntabel | | √ | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB rancangan akhir Renja PD
- a. Yakinkan tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan pada BAB III Renja PD didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah BAB II

BPKAD

| No | Tujuan dan sasaran Renja, Program dan Kegiatan | Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Catatan Reviu | | |
|----|--|---|---------------|--------------|-------------|
| | | | Sesuai | Tidak Sesuai | Rekomendasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Tujuan : | | | | |
| a. | Terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan profesional melalui jaringan elektronik | | √ | - | - |
| b. | Terlaksananya pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertanggungjawab | | √ | - | - |
| c. | Tersajinya laporan keuangan dan aset daerah yang sistematis dan akuntabel | | √ | - | - |
| | | | | | |
| 2. | Sasaran : | | | | |
| a. | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui sistem jaringan elektronik | | √ | - | - |
| b. | Terlaksananya pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertanggungjawab | | √ | - | - |
| c. | Tersajinya laporan keuangan dan aset daerah yang sistematis dan akuntabel | | √ | - | - |
| | | | | | |
| 3. | Program dan kegiatan | | | | |
| a | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | √ | - | - |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | √ | - | - |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | √ | - | - |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | √ | - | - |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | √ | - | - |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | √ | - | - |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | √ | - | - |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | √ | - | - |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | √ | - | - |
| b | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Perencanaan yang kurang tepat hingga menimbulkan jumlah silpa yang besar | √ | - | - |
| | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | √ | - | - |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | √ | - | - |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | √ | - | - |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | √ | - | - |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | √ | - | - |
| | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | √ | - | - |
| | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | √ | - | - |
| | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | √ | - | - |
| | PPKD | | √ | - | - |
| | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | √ | - | - |
| c | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Keberadaan aset tetap daerah yang belum dapat ditelusuri kebenarannya karena terkendala bukti kepemilikan, Masih banyaknya aset tetap yang belum memiliki sertifikat | √ | - | - |
| | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | √ | - | - |

2. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB rancangan akhir Renja PD

b. Yakinkan kinerja kegiatan / sub kegiatan mendukung kinerja program Renja PD dan Renstra PD

| KINERJA PROGRAM RENJA PD DAN RENSTRA PD | | KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | BPKAD Catatan Revisi | | |
|---|--|--|---|-------------------------|--------------|-------------|
| | | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Sesuai | Tidak Sesuai | Rekomendasi |
| a | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | presentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | √ | - | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | √ | - | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | √ | - | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | √ | - | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | √ | - | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | √ | - | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | √ | - | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | √ | - | |
| b | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | presentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS | √ | - | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | √ | - | |
| | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | √ | - | |
| | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | √ | - | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | √ | - | |
| | | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | √ | - | |
| | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | √ | - | |
| | | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | √ | - | |
| PPKD | | √ | - | | | |
| | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | √ | - | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|---|---|--|
| | | | | √ | - | |
| c | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah aset daerah yang teraudit/tahap n-1 dibagi jumlah aset daerah n-1 dikali 100% | √ | - | |
| | | | | | | |

Kendal, Agustus 2023

Tim Revisi Renja :

1. Juwenti, S.Sos.,M.Si

Koordinator Teknis



2. Mohamad Suyuti, S.E.,M.M.

Supervisor

3. Dhena Arief Kurniawan, S.E.

Ketua Tim



4. Adi Suyono, S.E.

Anggota

5. Nur Chasmah, S.S.iT

Anggota